



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 1 Tahun 2021

Doi : 10.21043/politea.v4i1.10248

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

## **Hegemoni Kiai di Desa Payaman Solokuro Lamongan pada Pemilu 2019**

**Khoridatus Sa'adah, Agus Machfud Fauzi**

*Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Surabaya*

*khoridatus.18038@mhs.unesa.ac.id, agusmfauzi@unesa.ac.id*

### **Abstract**

A Kiai has a high position both socially and spiritually that affects the power of influence over society's choices. The writing was intended to analyze the travel process of hegemoni by Kiai as a sales figure for the golongan karya political party. The research approach used is descriptive qualitative through interviews and observations at the Darul Ma'arif village Payaman Solokuro Lamongan. The hegemonic theory of Antonio Gramsci was used as a basis for analysis. The final result is that the hegemoni sequence of Kiai is absorbed in two parts. This division is based on the difference in age and background. The first group is a society that is over 60 years old and hegemoni is taking a spiritual approach. Its real form, the practice of hegemony was melted down during recruitment. Intellectual ramming is directed as a measure of obedience to the strings to receive a blessing. The second group is scholars and educators. Hegemoni in this group uses discussion forums or coordination meetings by all members of the foundation. The hegemonic column for the educated and more rational group of educators. The real inversion, ramming was done by showing a good track record by the golongan karya party.

Keywords: kiai, hegemoni, general election

### **Abstrak**

Seorang Kiai memiliki kedudukan tinggi baik secara sosial maupun spiritual yang berdampak pada kuatnya pengaruh atas pilihan masyarakat. Tulisan ini bertujuan menganalisis proses perjalanan hegemoni oleh Kiai sebagai tenaga marketing partai politik golongan karya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma'arif desa Payaman Solokuro Lamongan. Teori hegemoni dari Antonio Gramsci digunakan sebagai dasar analisis. Hasil akhirnya, proses tahapan hegemoni oleh Kiai terskemakan dalam dua bagian. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan usia dan latar belakang. Kelompok pertama adalah masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun maka hegemoni dilakukan melalui pendekatan spiritual. Wujud nyatanya, praktik hegemoni dileburkan pada saat pengajian rutin. Penundukan intelektual diarahkan sebagai bentuk kepatuhan atas dawuh Kiai agar mendapatkan keberkahan. Kelompok kedua yakni kaum terpelajar dan tenaga pendidik. Hegemoni dalam kelompok ini memanfaatkan forum diskusi atau rapat koordinasi oleh semua anggota Yayasan. Lajur hegemoni bagi kelompok terpelajar dan tenaga pendidik diarahkan secara lebih rasional. Wujud nyatanya, penundukan dilakukan dengan memperlihatkan rekam jejak yang baik oleh Partai Golongan Karya.

Kata Kunci : Kiai, Hegemoni, Partai Politik

## Pendahuluan

Kondisi politik Indonesia semakin ramai diwarnai oleh setiap aktor dengan berbagai kepentingannya. Politik adalah kendaraan individu atau kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu kaitannya dengan kekuasaan yang ingin didapatkan. Partai politik menjadi salah satu produk politik yang memiliki peranan penting sebagai wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan sistem negara Indonesia yakni demokratis (Imansyah, 2012). Kondisi negara Indonesia yang secara geografis membentang dari sabang hingga merauke berdampak pada kemajemukan baik secara bahasa, budaya, ras, serta agama yang dianut. Kondisi ini membawa banyak pikiran, kepentingan serta aspirasi yang berbeda dalam setiap kepala. Bahwa sejalan dengan kondisi ini maka partai politik sudah seharusnya menjadi garda terdepan. Hal ini sesuai dengan fungsi dibentuknya partai politik yakni sebagai sebuah sistem atau perkumpulan dari individu-individu yang bertugas untuk menyatukan atau menjadikan satu seluruh kepentingan warga negara atau masyarakat selanjutnya dibentuk menjadi suatu kebijakan yang direncanakan dalam sebuah agenda (Meyer, 2012). Proses inilah nantinya menjadi daya tarik tersendiri bagi partai politik yang dinilai masyarakat sudah menjalankan aspirasinya sehingga mendapatkan dukungan pada saat pemilihan umum.

Keberadaan partai politik menjadi penting sebagai perantara atau jembatan yang dapat digunakan untuk menghubungkan masyarakat dengan negara. Partai politik membutuhkan dukungan masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya (Ibad, 2019). Serta memperebutkan kursi pada parlemen yang dilakukan melalui pemilihan umum dalam kurun waktu lima tahun sekali. Pada saat-saat inilah banyak partai politik yang saling berlomba untuk mencuri perhatian rakyat dengan menunjukkan kepeduliannya melalui pemberian bantuan, melakukan banyak kegiatan perubahan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat hingga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan massa demi memenangkan partai politik saat pemilu nantinya.

Realitasnya, berbagai usaha yang dilakukan partai politik tertentu tidak selalu berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya. Banyak praktik kecurangan yang dilakukan para tokohnya demi melancarkan aksi untuk mendapatkan suara terbanyak. Berbagai tindakan amoral seperti kecurangan mulai dilakukan. Salah satunya adalah praktik *money politic* yang sudah menjadi budaya dan tidak bisa dilepaskan dan ditinggalkan begitu saja. Sebab banyak masyarakat yang mulai menggantungkan pilihan bukan didasarkan pada aksi serta peran yang dilakukan partai politik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun, pilihan dijatuhkan pada partai politik yang memberikan santunan kepada masyarakat (Hasan, 2019). Dasar inilah maka politik dekat

dengan istilah tindakan amoral yang dilakukan para aktornya. Contoh lain kecurangan yang dilakukan partai politik dapat ditemukan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Desa Payaman termasuk ke dalam Desa dengan tingkat religiusitas tinggi dengan banyak ditemukan tokoh agama Islam atau biasa disebut dengan Kiai.

Peran Kiai dalam suatu sistem masyarakat nyatanya tidak sebatas tokoh agama saja. Melainkan, menjadi bagian dari agensi politik. Pengaruh Kiai yang sangat kuat di masyarakat sebagai tokoh yang di dengar membawa nilai lebih bagi bekal Kiai untuk menjadi bagian dari kekuatan politik (Nurhadi, 2018). Realitas ini membawa kondisi baru, yakni pergeseran peran Kiai yang tidak sebatas pada sektor agama saja. Namun, sudah bergeser menjadi tokoh sentral dalam memberikan pengaruh di sistem politik (Muazaroh, 2019). Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma'arif menjadi salah satu lembaga terbesar di desa Payaman dengan jumlah pendidikan formal sebanyak 6 unit dan lembaga pendidikan non formal sebanyak 5 unit. Peran Kiai dalam memberikan pengaruh terhadap pilihan politik tentu akan berdampak besar (Adiyanto, 2020). Hal ini menjadi relevansi dengan perspektif agama yang mencirikan masyarakat sebagai individu patuh terhadap pemuka agama. Posisi Kiai dalam masyarakat Payaman sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Payaman yang memiliki nilai religiusitas yang sangat tinggi. Sehingga segala bentuk tindakan, ucapan atau dawuh Kiai memiliki potensi besar atas pengaruh yang diberikan terhadap tindakan politik masyarakat (Pradana, 2021).

Realitas ini ternyata dapat diskemakan dengan baik oleh Partai Golongan Karya. Berangkat dari realitas ini maka Partai Golongan Karya melirik lokasi ini untuk melakukan perjanjian dan kerja sama. Realitas ini ditemukan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Sebab peneliti menyaksikan secara langsung proses hegemoni yang dilakukan. Bentuk kerja sama tersebut adalah Partai Golongan Karya memberikan sejumlah dana yang diberikan untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya Partai Golongan Karya meminta dukungan dari Kiai dan masyarakat setempat untuk turut serta menjadi bagian dari pendukung Partai Golongan Karya di pemilihan umum tahun 2019 lalu. Kedudukan Kiai yang tinggi di mata masyarakat dan berdampak pada kuatnya pengaruh yang dimiliki. Kondisi ini menjadi kekuatan yang dimiliki untuk melakukan hegemoni kepada seluruh masyarakat untuk memilih Partai Golongan Karya pada pemilihan umum tahun 2019. *Gap* dalam penelitian ini adalah seharusnya seorang Kiai bertindak sebagai individu yang netral sebab menjadi panutan. Namun, realitas yang terjadi Kiai tersebut menjadi bagian dari aktor yang menghegemoni masyarakat dengan posisi tinggi yang dimiliki demi keuntungan berupa bantuan dari partai politik berupa dana yang diarahkan untuk

pengembangan infrastruktur. Berangkat dari masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik hegemoni yang dilakukan Kiai dalam pemilihan partai politik.

Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada sebab dari hegemoni dilakukan. Seperti yang dapat dilihat pada penelitian relevan pertama hingga ketiga. Keterlibatan Kiai dalam polemik politik banyak disebabkan oleh keterlibatan secara personal, dalam arti tokoh ulama atau Kiai tersebut memang menjadi bagian dari pihak politik tersebut. Sedangkan pada penelitian keempat dan kelima tokoh Kiai cenderung menjadi penengah atau pihak yang netral serta hubungan keduanya bisa diintegrasikan tanpa adanya motif terselubung. Penelitian ini mengambil posisi secara lebih dekat untuk menjelaskan orientas dasar praktik hegemoni dilakukan. Selanjutnya, menganalisis proses dan tahapan hegemoni yang dilakukan oleh Kiai dalam keikutsertaan menjadi bagian dari pendukung Partai Golongan Karya pada pemilu tahun 2019.

Penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti pada beberapa jurnal penelitian sebelumnya. Seperti halnya peran Kiai dalam keterlibatan pada pemilu tahun 2009 di daerah Glenmore Banyuwangi. Keterlibatan Kiai di pemilu tersebut adalah dengan dasar adanya motif yang dimiliki untuk melakukan doktrin keagamaan, sosial, ekonomi, dan kekuasaan dalam dominasi pragmatis (Sadi, 2016). Kiai dalam pesantren di Madura memiliki peran penting dalam partisipasi terhadap politik. Seperti halnya peran Kiai menjadi tokoh patron politik di masyarakat, pengurus partai yang dapat menjadi tokoh yang dipandang masyarakat, serta mediator politik (Nurhadi, 2018). Hegemoni yang dilakukan Kiai di Pondok Pesantren Sunan Drajat dilakukan melalui wejangan dari tokoh Kiai yang diarahkan pada santri dan wali santri untuk mengikutinya. Sikap tawaduk sebagai seorang santri yang diperoleh melalui pembelajaran di pesantren sebelumnya menjadi kekuatan keberhasilan hegemoni dalam seruan pada pemilihan Bupati tahun 2015 (Anugrah, 2015). Hubungan Kiai dengan berbagai polemik politik tidak selamanya berjalan atas dasar keuntungan masing-masing pihak. Ada kalanya keduanya disinergikan dalam sebuah kegiatan positif yang keduanya saling menguntungkan. Baik dari sisi dakwah yang terbantu dengan percepatan tujuan serta jangkauan maupun dari sisi politik di masa pemilunya (Rosi, 2020). Pada saat tertentu netralitas seorang Kiai juga ditemukan dalam menghadapi masa politik. Seperti halnya yang terjadi pada Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan. Kiai Sholeh sebagai pimpinan pesantren tersebut mengaku bersikap netral dan tidak menjadi bagian pada pihak politik tertentu. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Kiai Sholeh mendukung sistem demokrasi di Indonesia

serta memilih bersikap netral demi menjaga kedamaian dengan santri, ustaz, dosen, mahasiswa, wali santri, hingga alumni (Aminuddin, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang melihat praktik hegemoni oleh Kiai dalam pemilihan partai politik. Menurut Sadewo (2016) kualitatif digunakan untuk memahami realitas sosial yang digali melalui rasionalitas tindakan seseorang. Maknanya, proses penggambaran fenomena yang terjadi di lapangan digambarkan secara jelas dan terperinci dalam penelitian (Sugiyono, 2008). Realitas hegemoni membawa subyek penelitian kepada masyarakat sebagai pihak terhegemoni. Data penelitian ini akan didapatkan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan 6 informan. Tiga informan merupakan *purposive sampling* dari kelompok pertama, yakni masyarakat yang berumur lebih dari 60 tahun dan mengikuti pengajian rutin. Tiga informan selanjutnya juga dipilih melalui *purposive sampling* dari kelompok kedua, yakni kelompok terpelajar dan tenaga pendidik. Makna *purposive sampling* adalah pemilihan informan dilakukan dengan *random* (Singarimbun, 1995). Namun, membawa tujuan yakni kebutuhan data yang sesuai dan mendukung penelitian. Informan yang dipilih melalui *purposive sampling* membawa tujuan untuk menjawab dan mengetahui titik masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan gap penelitian, yakni fenomena seharusnya dan senyatanya tidak berjalan secara sinkron.

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma'arif di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari data pokok atau biasa disebut dengan primer serta data tambahan atau biasa dikenal dengan data sekunder (Subadi, 2006). Data primer didapatkan dengan proses wawancara secara informal. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan proses observasi saat praktik hegemoni berlangsung. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui berbagai tahapan. Pertama adalah pemaparan data dari hasil wawancara di lapangan. Penampilan data yang baik akan mendukung peneliti dalam proses (Sabarguna, 2006). Data yang diperoleh di lapangan direduksi dengan menyaring dan memilih data sesuai kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk memberikan batasan agar hasil penelitian terarah dan tidak keluar dari bahasa informan. Setelah proses penyaringan dan pemaparan data maka dilanjutkan dengan analisis teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Pemaparan hasil penelitian adalah hasil dari konstruksi data secara keseluruhan, serta teori dan dokumen yang telah didapatkan. Selanjutnya dijelaskan dengan metode deskriptif. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah proses triangulasi yang dilakukan peneliti. Proses ini dilakukan dalam upaya untuk *cross check* antara data

dari hasil wawancara dengan studi literatur yang didapatkan serta pendapat lain (Sabarguna, 2006). Pencocokan dilakukan menggunakan studi pustaka berupa penelitian relevan yang sudah ditemukan. Setelah itu penarikan kesimpulan dilakukan dengan kehati-hatian serta ketepatan karena nantinya akan dipertanggung jawabkan.

## **Pembahasan**

### *Teori Hegemoni*

Penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Hegemoni sendiri memiliki makna sebagai sebuah tindakan yang dilakukan secara terselubung untuk mencapai tujuan tertentu melalui perangkat kekuasaan (Qomaruddin, 2018). Teori ini bukan melihat suatu kekuasaan dalam sistem sebagai kondisi yang tidak seimbang. Namun, titik fokusnya adalah penundukan secara tidak sadar sehingga berdampak pada persetujuan. Gramsci melihat hegemoni sebagai suatu konsensus atau dalam istilah lain bermakna kesepakatan dalam suatu sistem atau struktur masyarakat. Kesepakatan dapat terjadi dalam sistem masyarakat disebabkan oleh 3 hal (Siswati, 2017). Pertama adalah ketakutan aktor terhadap konsekuensi ketika tidak menjadi bagian dari konsensus tersebut. Kedua adalah kesepakatan terjadi sebab masyarakat sudah terbiasa sehingga menjadi hal yang dinilai lazim. Sebab itu pula masyarakat menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Ketiga adalah masyarakat yang memang memiliki pengetahuan dan memiliki kesetujuan dengan konsensus dalam strukturnya. Gramsci membagi hegemoni dalam 3 tingkatan (Ali, 2017). Pertama yakni hegemoni total yang melihat bahwa hegemoni dilakukan dengan penundukan moral dan intelektual sehingga tidak terdapat hubungan kontradiksi antar kedua pihak. Kedua yakni hegemoni yang merosot. Maknanya, praktik hegemoni dilakukan dengan adanya potensi konflik serta disintegratif. Namun, tidak adanya keberanian untuk membuka secara nyata konflik tersebut. Artinya, konflik ada tetapi terpendam di dalam permukaan. Ketiga adalah hegemoni minimum. Melihat bahwa praktik hegemoni dilakukan dengan tidak adanya campur tangan serta keengganan kelompok hegemonis untuk menyesuaikan diri dengan kepentingan kelas lain.

### *Partai Politik dalam Masyarakat*

Berbagai praktik politik seringkali ditemukan pada sistem bermasyarakat. Politik yang kerap disandingkan dengan berbagai citra buruknya nyatanya terus dibutuhkan. Pemaknaan politik pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan terus berkembang serta

dinamis (Nambo & Puluhuluwa, 2005). Makna politik banyak didefinisikan sebagai sebuah perilaku manusia yang dilakukan untuk memberikan pengaruh atas diri lain di luar individu dengan jalan kekuasaan yang dimiliki. Pada dasarnya politik bukanlah perihal amoral seperti yang dicetuskan oleh Niccolo Machiavelli. Politik dibutuhkan dalam hal mengatur kehidupan tata negara (Zein, 2016). Politik dapat menjadi suatu tindakan yang baik apabila dalam praktiknya tidak terjadi tindak salah guna. Kekuasaan yang ditawarkan dalam dunia politik sering kali membuat individu atau kelompok sebagai aktor menjadi gelap mata. Bayang-bayang kekuasaan dengan segala nilai lebih yang ditawarkan mampu membuat individu bertindak melanggar aturan hukum yang telah diberikan. Berangkat dari proses inilah selanjutnya politik menjadi begitu dekat dengan tindak amoral pelakunya. Hingga kini persepsi politik di mata masyarakat umum menjadi buruk seiring dengan rekam jejak aktor di dalamnya yang banyak melakukan tindak penyelewengan, salah satunya korupsi (Kamuri, 2019). Baik dampak buruk bagi diri individu tersebut atau bagi masyarakat secara umum. Citra buruk politik yang mengakar kuat pada masyarakat nyatanya sulit dihilangkan. Banyak ditemukan fakta bahwa masyarakat lebih memilih untuk menjauhkan diri dengan politik agar tidak menjadi bagian dari lingkaran amoral politik. Dampaknya adalah masyarakat semakin jauh dengan makna dan hakikat keberadaan politik bagi suatu bangsa. Bahwa politik bukan hanya tentang tindak amoral para tokohnya. Namun, keberadaannya diperlukan dalam upaya mengatur suatu tatanan negara.

Salah satu produk politik yang menjadi bagian langsung dari masyarakat adalah partai politik. Partai politik atau biasa disingkat menjadi istilah parpol merupakan suatu kendaraan individu atau kelompok untuk menjadi bagian dari pemerintahan negara. Partai politik dapat diejawantahkan sebagai wadah kepentingan masyarakat bawah selanjutnya diakumulasi dan dibentuk sebagai rancangan serta gagasan bagi suatu negara (Meyer, 2012). Maknanya, partai politik adalah sebuah badan yang menjadi fasilitator masyarakat secara menyeluruh. Melihat dari hakikat dasar partai politik seharusnya keberadaan parpol menjadi angin segar bagi masyarakat untuk merealisasikan kepentingan masyarakat (Muhadam & Teguh, 2015). Namun, praktik yang terjadi di lapangan tidak selamanya berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Praktik yang terjadi adalah banyak tindak penyelewengan yang terjadi dan dilakukan oleh banyak aktornya. Partai politik bukan lagi menjadi angin segar serta fasilitator kepentingan masyarakat secara umum. Namun, hanya mewakili kepentingan para kelompok partai politik tersebut. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik (Noor, 2016), ditambah dengan perilaku amoral para tokohnya yang seringkali merugikan masyarakat kelas bawah seperti halnya tindak korupsi yang sudah banyak terjadi.

Keberadaan partai politik bukan lagi sebagai penyalur kepentingan masyarakat. Namun, berbalik arah menjadi kelompok yang merugikan rakyat. Persepsi buruk masyarakat pada partai politik tidak bisa disalahkan sepenuhnya sebab yang terjadi adalah partai politik memang meresahkan warga negara (Efriza, 2019).

Berdirinya suatu partai politik pada dasarnya tidak bisa lepas dari dukungan masyarakat. Hal ini sebab masyarakat adalah pihak yang sudah seharusnya dipenuhi kepentingannya melalui partai politik. Jadi berdirinya partai politik harus mendapatkan dukungan 20 % dari masyarakat (Haris dkk, 2016) . Dukungan ini diberikan masyarakat melalui pemilihan umum yang terjadi selama kurun waktu lima tahun sekali. Keberadaan partai politik untuk menyalurkan kepentingan masyarakat hanya terjadi menjelang pemilihan umum yang dilakukan selama lima tahun sekali. Jadi Ketika sudah dekat masa pemilu maka berbagai partai politik akan berlomba untuk saling menunjukkan eksistensi melalui aksi untuk mendapatkan simpati masyarakat. Tentu hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan banyak pada saat pemilu nantinya. Pada periode ini maka berbagai partai politik akan saling menunjukkan kepedulian tinggi kepada masyarakat dengan banyak mendatangi masyarakat bawah serta memberikan banyak bantuan agar timbul citra baik di mata masyarakat (Azhar, 2017). Namun, hal ini hanya akan terjadi menjelang pemilihan umum saja. Maksudnya, aksi atau tindakan partai politik sebagai fasilitator hanya terjadi selama kurun waktu lima tahun sekali. Masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut maka akan dengan senang hati menerima uluran bantuan dari partai politik tersebut. Pada masyarakat umum yang tidak memiliki pengetahuan tentang rekam jejak politik maka akan dengan mudah jatuh hati. Selanjutnya menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung partai politik tersebut di pemilu. Hal inilah yang diharapkan partai politik agar mendapatkan suara atau dukungan banyak dari masyarakat agar menjadi pemenang dalam pemilihan umum nantinya.

Siklus ini sudah terjadi sejak lama dan masyarakat seperti turut memahami kondisi ini. Partai politik dengan segala kepentingannya hanya membutuhkan masyarakat saat menjelang pemilihan umum (Suryadi, 2021). Ketika pemilihan umum sudah berakhir maka perhatian partai politik pada masyarakat juga turut menghilang sebab kepentingan partai politik sudah dipenuhi masyarakat. Skema ini akan terus terjadi dan masyarakat menjadi bagian dari pendukung partai politik. Masyarakat yang diberikan bantuan oleh partai politik merasa senang dan dipedulikan maka masyarakat akan membalas dengan memilih partai politik tersebut saat pemilu (Ramlah, 2020). Masyarakat seperti memiliki beban moral untuk menjatuhkan pilihan pada partai politik yang sudah memberikan bantuan sebagai tanda terima kasih. Pilihan masyarakat pada partai politik tertentu bukan didasarkan pada



rekam jejak partai politik tersebut selama lima tahun. Namun, didasarkan pada partai politik mana yang memberikan bantuan menjelang pemilihan umum. Praktik inilah yang selanjutnya menimbulkan banyak kecurangan atau tindak amoral oleh para aktornya. Seperti halnya politik uang yang diberikan partai politik kepada masyarakat.

Praktik ini sudah berjalan lama dan menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan uang dari partai politik dan masyarakat akan memberikan pilihan atau suara pada partai politik tersebut saat pemilihan umum. Praktik ini terjadi secara natural dan bahkan sudah menjadi budaya pada masyarakat tertentu tanpa ada yang merasa dirugikan (Okthariza, 2019). Bahkan pada masyarakat tertentu yang sudah terbiasa mendapatkan uang saat akan pemilu merasa asing ketika tidak mendapatkan uang kembali dan memilih menjadi golput. Sebab selama ini masyarakat sudah terbiasa menjatuhkan pilihan pada partai politik yang memberikan uang atau bantuan kepada masyarakat. Banyak cara yang dilakukan partai politik untuk mengambil hati masyarakat agar memilihnya dalam pemilihan umum (Fatimah, 2018). Seperti halnya memberikan bantuan sosial serta dana atau uang, kampanye dengan berbagai media, sosialisasi kepada masyarakat, menunjukkan simpati dengan mengunjungi tempat-tempat bencana yang selanjutnya diliput media, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mendekati tokoh atau individu yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

### *Orientas Dasar Hegemoni Oleh Kiai*

Desa Payaman, Solokuro Lamongan memiliki tingkat religiusitas yang tinggi serta keagamaan yang kental atas kepercayaan yang dianutnya. Kondisi sosial masyarakat Payaman begitu terasa nilai keagamaan dibuktikan dengan hadirnya 3 pesantren besar dalam satu Desa serta banyak terdiri surau-surau kecil serta lembaga pengajaran mengaji. Masyarakat Desa Payaman 100 % memeluk agama Islam dengan 2 organisasi Islam yang kuat yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada agama dan intensitas ritual keagamaan yang tinggi pula menjadi peluang yang diketahui oleh salah satu partai politik untuk melakukan pendekatan melalui jalur ini. Kuatnya pengaruh Kiai sebagai tokoh atau pemuka agama Islam menjadi dasar salah satu partai politik meminta dukungan. Kondisi keagamaan masyarakat Payaman yang begitu mengagungkan Kiai sebagai tokoh yang disegani membuat partai politik golongan karya mencoba untuk melakukan kerja sama agar mendapatkan dukungan masyarakat.

Berbagai pesantren yang ada di Desa Payaman adalah berdiri dalam sebuah Lembaga atau Yayasan. Partai politik selanjutnya masuk melalui pendekatan ini untuk mendapatkan suara. Partai politik golongan karya memilih jalur pendekatan ini untuk

mendapatkan simpati masyarakat dengan mengajak tokoh yang disegani serta memiliki pengaruh kuat di masyarakat untuk menjadi bagian dari pendukungnya. Terjadi tindak kerjasama dalam praktik ini. Partai Golongan Karya yang bisa membaca situasi atas kuatnya pengaruh Kiai bagi masyarakat Desa Payaman selanjutnya mengajak Kiai bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan pihak Kiai adalah mendapatkan dana bantuan besar untuk pengembangan Yayasan belajar yang dimiliki. Selanjutnya partai politik golongan karya mendapatkan keuntungan yakni dukungan dari Kiai serta lembaga tersebut dan masyarakat Payaman. Tentu dukungan tersebut sangat berarti bagi Partai Golongan Karya untuk memenangkan pemilihan umum dan pihak Yayasan mendapatkan bantuan dana untuk pengembangan fasilitas serta infrastruktur untuk semakin meningkatkan daya jual Yayasan tersebut. Kerja sama ini dilakukan keduanya dengan saling mendapatkan keuntungan. Kerja sama ini terjadi saat menjelang pemilihan umum tahun 2019.

Dukungan yang dijanjikan oleh pihak Kiai serta masyarakat kepada Partai Golongan Karya selanjutnya membawa praktik lain yang terjadi. Praktik tersebut adalah hegemoni yang dilakukan Kiai kepada masyarakat sebagai tokoh yang memiliki pengaruh kuat serta didengar oleh masyarakat. Praktik hegemoni dilakukan dengan menundukkan pengetahuan masyarakat agar turut serta menjadi bagian dari pendukung Partai Golongan Karya. Tokoh Kiai menjadi begitu kuat di masyarakat terjadi sebab masyarakat yang agamis serta menganggap Kiai sebagai tokoh yang memiliki kesakralan tinggi sebab tingginya ilmu agama yang dimiliki (Nasir, 2015). Kiai dinilai sebagai individu yang sangat dekat dengan Tuhan dan memancarkan aura kebaikan bagi masyarakat sebab ilmu yang dimiliki. Selain itu kewibawaan seorang Kiai begitu terpancar kuat sehingga membuat masyarakat menjadi segan. Kekuatan Kiai di masyarakat adalah Kiai memiliki ilmu agama yang sangat tinggi, sebab itu maka Kiai harus dihormati. Kiai memiliki wibawa serta aura kebaikan yang terpancar maka Kiai harus disegani. Serta Kiai bagi masyarakat adalah ladang keberkahan dan memiliki kekuatan magis dalam konotasi yang baik maka Kiai juga harus dipatuhi. Berbagai keistimewaan yang dimiliki Kiai di mata masyarakat ini menempatkan Kiai berada di posisi tinggi bagi masyarakat (Hannan & Abdillah, 2019). Kepatuhan pada Kiai ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan keberkahan serta kebaikan yang terpancar dari diri Kiai. Pengaruh kuat yang dimiliki Kiai ini menimbulkan praktik hegemoni. Perbedaan pengetahuan yang dimiliki membuat praktik hegemoni dapat dengan mudah dilakukan. Hegemoni bukan dilakukan dengan pemaksaan. Namun, dengan praktik penundukan pengetahuan.

### *Proses Tahapan Hegemoni oleh Kiai*

Hegemoni yang dilakukan Kiai kepada masyarakat agar menjadi bagian dari pendukung Partai Golongan Karya dilakukan melalui sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Lebih tepatnya bentuk hegemoni dilakukan melalui penundukan pengetahuan kepada masyarakat saat praktik ritual keagamaan terjadi. Praktik hegemoni ini terskema dengan baik. Hegemoni bukan dilakukan secara langsung oleh Kiai kepada seluruh masyarakat. Namun, terskemakan menjadi dua bagian. Sebelumnya, hegemoni dilakukan oleh Kiai melalui individu yang dipercayai dan diberikan amanah, dalam hal ini adalah individu yang berasal dari kelompok pihak Yayasan. Proses hegemoni selanjutnya diskemakan dalam 2 kelompok atau bagian. Kelompok pertama adalah masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun hegemoni dilakukan melalui pendekatan spiritual. Wujud nyata, praktik hegemoni dileburkan pada saat pengajian rutin. Penundukan intelektual diarahkan sebagai bentuk kepatuhan atas dawuh Kiai agar mendapatkan keberkahan (Anugrah, 2015).

Kelompok pertama, yakni masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun memiliki ritual keagamaan berupa pengajian yang diisi oleh Kiai atau wakilnya. Pengajian tersebut adalah pengajian kitab kuning yang dilakukan setiap hari Jum'at siang. Forum pengajian ini dilakukan sebagai wadah untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Pengajian difokuskan pada berbagai pemahaman fikih, akidah, dan juga tasawwuf. Pengajian ini terbentuk dalam model ceramah agama, yakni Kiai membacakan setiap kalimat dalam tulisan jawa pegon. Selanjutnya diartikan dalam Bahasa Jawa dan Indonesia serta dilanjutkan dengan penjelasan makna dari setiap kalimat yang telah dibacakan. Masyarakat dalam keikutsertaan pengajian ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Pengajian yang hanya dihadiri oleh masyarakat dengan rata-rata umur 60 tahun ini adalah proses yang dilakukan untuk mendalami agama Islam secara lebih luas. Intensitas masyarakat dengan Kiai selanjutnya menjadi tinggi sebab pengajian yang dilakukan. Dampaknya adalah kepatuhan masyarakat terhadap Kiai menjadi sangat tinggi. Sebab bagi masyarakat dalam kelompok ini, Kiai adalah seorang ulama atau orang yang berilmu agama maka segala tindakan dan juga ucapan yang keluar dari Kiai menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. Masyarakat tidak perlu mempertanyakan apa maksud dan tujuan Kiai untuk memerintahkan suatu hal. Namun, kepatuhan masyarakat adalah sebagai bentuk tawadhu' kepada Kiai dengan pengharapan keberkahan demi kemudahan kehidupan selanjutnya. Istilah ini biasa dikenal dengan *sami'na wa atho'na*.

Praktik pengajian yang mempertemukan Kiai dengan masyarakat menjadi media yang sangat baik kaitannya dengan pelaksanaan hegemoni. Kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi kepada Kiai menjadi dasar kemudahan hegemoni dilakukan (Wicaksono, 2019). Hegemoni atau penundukan secara intelektual dilakukan dengan sifat tidak memaksa. Maknanya, masyarakat yang dihegemoni tidak dalam keadaan sadar bahwa ia sedang ditundukkan. Masyarakat akan merasa bahwa hegemoni melalui verbal tersebut adalah sebuah relevansi dengan pengetahuan agama yang telah didapatkan. Konsep hegemoni pun tidak benar diketahui oleh masyarakat sehingga praktiknya menjadi semakin mudah. Penundukan intelektual pada akhirnya akan membawa tindakan afirmasi bahwa setiap kata dan kalimat yang keluar dari penghegemoni adalah suatu kebenaran dan masyarakat menjadi bagian di dalamnya. Pada akhirnya, hegemoni memberikan pengaruh atas tindakan atau paling tidak adalah pemikiran orang lain melalui penundukan intelektual yang dilakukan secara tidak sadar (Jannah, 2019).

Proses nyata hegemoni pada kelompok pertama ini adalah disisipkan pada saat pengajian berlangsung. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa model pengajian dilakukan dengan metode ceramah. Pada saat Kiai telah membacakan satu kalimat atau bait pada kitab kuning tersebut maka dilanjutkan dengan pemberian penjelasan. Saat inilah Kiai mulai menyisipkan pengetahuan tentang keberpihakannya kepada partai politik Golkar. Penundukan pengetahuan dilakukan pada saat pengajian dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya memilih partai yang baik dan benar serta amanah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Bahwa masyarakat pada rentan usia 60 tahun di Payaman banyak yang tidak melek politik. Masyarakat bahkan tidak mengetahui fungsi partai dan juga eksistensinya dalam sistem kemasyarakatan. Berangkat dari ketidaktahuan masyarakat tentang partai politik maka menjadi angin segar ketika tokoh yang sangat dihormati memberikan pengetahuan atas pilihan partai politik. Kiai adalah pemimpin dan juga panutan maka masyarakat merasa bahwa dirinya adalah makmum atau rakyat yang sudah seharusnya patuh atas dawuh Kiai. Tindakan patuh ini membawa konsekuensi dan kebermanfaatannya bagi masyarakat, yakni keberkahan. Berkah adalah penggambaran jiwa dan kehidupan masyarakat sebagai karunia dari Tuhan yang membawa kemaslahatan.

Wujud lain hegemoni yang ditampilkan adalah penundukan intelektual kepada perspektif kepatuhan dalam relevansi ajaran agama. Seperti halnya, masyarakat ditundukkan dengan pengetahuan agama tentang memilih pemimpin agama yang baik. Bahwa memilih pemimpin yang baik dalam ajaran agama Islam adalah suatu keharusan. Sebab pemimpin menentukan masa depan masyarakat. Selanjutnya agar pemimpin yang

dipilih mampu melaksanakan tanggung jawab dan model kepemimpinannya berjalan sesuai dengan syariat yang diajarkan agama. Menjadi bagian dari masyarakat yang menggunakan hak suara dalam pemilu dikaitkan dengan ajaran agama yang berlaku (Kasdi, 2017). Kewajiban individu untuk memilih pemimpin yang baik adalah suatu keharusan. Pengetahuan ini diberikan dalam konstruksi awal. Maknanya, praktik hegemoni pertama kali dilakukan dengan pemberian pengetahuan tentang partai politik dan direlevansikan dengan perspektif agama Islam. Sebab kepatuhan masyarakat kepada agama Islam sangat tinggi maka pendekatan ini menjadi jalan awal masuknya hegemoni kepada masyarakat.

Penundukan selanjutnya, dilakukan dengan penyampaian partai politik yang baik menurut versi Kiai. Pada saat inilah penyampaian tentang Partai Golongan Karya mulai dilakukan. Pada proses ini Kiai mulai mengarahkan pilihan dan menunjukkan partai politik golongan karya yang baik dan sesuai dengan syariat ajaran agama serta tidak melakukan tindakan penyelewengan. Hegemoni atau penundukan pengetahuan ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat secara tidak langsung menjadi bagian dari pendukung Partai Golongan Karya. Pada akhirnya, secara lebih jelas dinyatakan bahwa hegemoni dilakukan dalam bentuk anjuran langsung oleh Kiai. Masyarakat dalam kelompok ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi bagian dari pendukung Partai Golongan Karya melalui hegemoni Kiai. Berarti bahwa masyarakat dalam kelompok ini melakukan suatu tindakan berdasarkan tokoh dibalikinya, bukan melihat esensi dari tindakan tersebut (Aziz, 2021).

Kerangka inilah yang menjelaskan alur hegemoni Kiai terhadap masyarakat. Tokoh Kiai yang memegang kepercayaan tinggi masyarakat membuat hegemoni semakin mudah dilakukan (Wicaksono, 2019). Proses afirmasi semakin diperkuat dengan hadirnya rasa tanggung jawab moral bagi masyarakat untuk mengafirmasi serta menjalankan anjuran Kiai. Sebab adanya kepercayaan masyarakat atas nilai keberkahan jika tunduk dalam anjuran yang disampaikan. Walau pada akhirnya keputusan akhir tetap menjadi domain masyarakat. Namun, hegemoni yang sudah dilakukan Kiai banyak memberikan pengaruh atas pertimbangan pengambilan keputusan untuk memilih Partai Golongan Karya pada pemilu tahun 2019.

Kelompok kedua dalam pembagian hegemoni adalah kaum terpelajar dan tenaga pendidik. Hegemoni dalam kelompok ini memanfaatkan forum diskusi atau rapat koordinasi oleh semua anggota Yayasan. Lajur hegemoni bagi kelompok terpelajar dan tenaga pendidik diarahkan secara lebih rasional. Wujud nyatanya, penundukan dilakukan dengan memperlihatkan rekam jejak yang baik oleh Partai Golongan Karya. Letak perbedaan hegemoni pada kedua kelompok ini pada keberlanjutan hegemoni. Pada

kelompok pertama hegemoni dilakukan tanpa adanya pengetahuan tentang konsep hegemoni. Maknanya, konsep hegemoni tidak dipahami secara nyata. Penundukan hanya berakhir pada masyarakat tanpa adanya keberlanjutan. Atau bermakna hegemoni dilkauan hanya untuk memberikan pengaruh saja. Sedangkan hegemoni pada kelompok kedua memiliki tanggung jawab lebih. Sebenarnya, konsepe tentang hegemoni tidak menjadi pengetahuan yang dimiliki. Maksudnya adalah hegemoni sebagai penundukan intelektual tidak diketahui. Bahwa pada kelompok kedua menyadari akan adanya pengaruh yang coba disampaikan. Namun, tidak memahami bahwa tindakan tersebut menjadi bentuk hegemoni atau penundukan pengetahuan. Hegemoni pada kaum terpelajar dan tenaga pendidik diarahkan untuk menjadi fasilitator. Jadi tenaga pendidik yang dihegemoni dan diberikan anjuran untuk menjadi bagian dari pendukung partai politik golongan karya juga turut dianjurkan untuk menjadi fasilitator. Maknanya, terjadi penurunan hegemoni atau hegemoni berantai. Perbedaanya adalah hegemoni pada tenaga pendidik dilakukan dengan pendekatan yang lebih rasional seperti diperlihatkan berbagai rekam jejak baik oleh partai politik golongan karya. Penundukan pengetahuan pada tenaga pendidik dan kaum terpelajar diarahkan untuk meneruskan penundukan tersebut. Atau dalam tanda kutip tenaga pendidik turut menjadi bagian dari penghegemoni yang dilakukan kepada keluarga dan masyarakat di sekitar di lingkungan tenaga pendidik tersebut.

Proses hegemoni pada kelompok ini disampaikan melalui forum diskusi dan rapat koordinasi Yayasan. Forum diskusi atau rapat koordinasi Yayasan dilakukan dalam tenggat waktu yang tidak bisa dipastikan. Rapat ini dilakukan atas instruksi langsung dari pengelola Yayasan ketika terdapat sesuatu hal yang perlu dibahas lebih lanjut. Rapat ini menjadi forum terbuka untuk setiap pendidik dan peserta di dalamnya menyampaikan pendapat yang membangun untuk kemajuan Yayasan. Forum ini dimulai dengan pemaparan kajian pembahasan yang akan diselesaikan pada hari tersebut. Selanjutnya, forum diskusi dibuka untuk setiap peserta forum dapat menyampaikan argumentasi dan pendapat. Pada akhirnya, rapat diakhiri dengan pembacaan hasil dan putusan yang sudah dilakukan pembahasan. Praktik hegemoni dalam forum ini dimuat pada bagian akhir. Setelah proses diskusi sudah berakhir maka pimpinan Yayasan yang sekaligus menjadi pimpinan sidang mulai melakukan hegemoni. Untuk kelompok kedua, memang hegemoni tidak dilakukan secara langsung oleh Kiai. Namun, dilakukan oleh pimpinan Yayasan, tentu setelah melakukan koordinasi sebelumnya.

Proses hegemoni pada kelompok ini dimulai dengan memberikan dasar pengetahuan tentang kondisi partai politik di Indonesia. Bahwa pemilihan partai politik

menjadi bagian dari pemilu. Penundukan dalam kelompok ini dilakukan secara lebih rasional maka pengetahuan yang disampaikan adalah tentang rekam jejak Partai Golongan Karya. Tentu rekam jejak yang dimaksudkan adalah dalam konotasi yang baik. Pengaruh pemikiran yang dilakukan melalui praktik hegemoni ini membawa harapan besar bagi Kiai dan Yayasan. Secara kuantitas, kelompok kedua lebih menjadi dominasi dari kelompok pertama. Penundukan melalui pemaparan rekam jejak partai politik memberikan pengaruh atas pilihan partai politik oleh kaum terpelajar dan tenaga pendidik. Sebenarnya, kelompok kedua dari pembagian atas usia dan latar belakang menjadi individu yang lebih rasional. Sebab kelompok tersebut diisi oleh tenaga pendidik yang tentu terpelajar dan melek politik. Sebab realitas ini pulalah maka hegemoni dilakukan melalui pendekatan yang lebih rasional.

Realitas yang ditemukan di lapangan ini sejalan dengan teori hegemoni dari tokoh Antonio Gramsci. Makna hegemoni tindakan penundukan intelektual tentu relevan dengan realitas di lapangan. Tindakan penundukan diejawantahkan sebagai proses pemberian pengaruh kepada masyarakat agar menjadi bagian dari pendukung partai politik golongan karya. Melalui kekuasaan berarti bahwa, Kiai memiliki kekuasaan sebagai tokoh berpengaruh di masyarakat. Teori ini bukan melihat suatu kekuasaan dalam sistem sebagai kondisi yang tidak seimbang. Namun, titik fokusnya adalah penundukan secara tidak sadar sehingga berdampak pada persetujuan (Hutagalung, 2004) . Pada akhirnya, penundukan pengetahuan dilakukan kepada masyarakat tentang pilihan partai politik golongan karya. Persetujuan berarti bahwa masyarakat mengafirmasi partai politik golongan karya menjadi pilihan saat pemilihan umum nantinya. Gramsci melihat hegemoni sebagai suatu konsensus atau dalam istilah lain bermakna kesepakatan dalam suatu sistem atau struktur masyarakat (Harjito, 2009). Kesepakatan dapat terjadi dalam sistem masyarakat disebabkan oleh 3 hal. Pertama adalah ketakutan aktor terhadap konsekuensi ketika tidak menjadi bagian dari konsensus tersebut. Bentuk ketakutan yang terjadi pada masyarakat ketika tidak menjadi bagian dari pendukung golongan karya adalah hilangnya keberkahan dari Kiai karena tidak bertindak patuh pada anjuran yang telah diberikan untuk memilih Partai Golongan Karya ketika pemilihan umum nantinya. Kedua adalah kesepakatan terjadi sebab masyarakat sudah terbiasa sehingga menjadi hal yang dinilai lazim. Sebab itu pula masyarakat menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Untuk sebab yang kedua ini tidak terjadi pada penelitian ini. Ketiga adalah masyarakat yang memang memiliki pengetahuan dan memiliki kesetujuan dengan konsensus dalam strukturnya. Untuk sebab ketiga terjadi pada beberapa masyarakat yang memang mengerti dan paham tentang partai politik golongan karya dan rekam jejaknya.

Realitas yang ditunjukkan pada penelitian ini bahwa hegemoni yang dilakukan adalah hegemoni total dan hegemoni yang merosot. Hegemoni total terjadi pada masyarakat yang buta politik, dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki usia 60 tahun ke atas. Sedangkan hegemoni yang merosot. Maknanya, praktik hegemoni dilakukan dengan adanya potensi konflik serta disintegratif. Namun, tidak adanya keberanian untuk membuka secara nyata konflik tersebut. Artinya, konflik ada tetapi terpendam di dalam permukaan. Hal ini terjadi sebab masyarakat Desa Payaman selain menjadi masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi juga sudah mulai banyak yang berpikir secara rasional. Serta memutuskan pilihan berdasarkan perhitungan yang matang. Hal ini terjadi pada masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi dan mengerti rekam jejak politik. Namun, ketakutan untuk berdiri di atas pilihan sendiri dimiliki sehingga potensi konflik di redam dan berada di bawah permukaan. Masyarakat yang berpikir secara rasional memiliki pilihan yang berbeda dengan hegemoni yang disampaikan. Namun, pada praktiknya tidak pernah benar diumbar. Kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dengan anjuran yang disampaikan cukup memendam selanjutnya pada pemilihan umum masyarakat kelompok rasional yang bertentangan ini memilih sesuai dengan apa yang diyakini. Pada akhirnya pembagian masyarakat terjadi. Pada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang partai politik beserta rekam jejak maka cenderung menjadi bagian dari kelompok yang mengafirmasi hegemoni tersebut. Namun, bagi masyarakat yang sudah melek politik maka akan menjadi kelompok masyarakat yang mengalami kegagalan hegemoni. Namun, ketidaksetujuan masyarakat atas hegemoni yang telah disampaikan tidak pernah ditampilkan. Cukup disimpan dan diyakini secara mandiri agar tidak terjadi konflik yang berbenturan.

## **Simpulan**

Partai politik sejatinya berfungsi untuk wadah aspirasi masyarakat merealisasikan kepentingan. Namun, partai politik membutuhkan dukungan masyarakat sebanyak 20 % untuk memastika posisi. Dukungan masyarakat disalurkan melalui pemilihan umum yang dilakukan selama lima tahun sekali. Pada masa inilah partai politik akan berlomba mengambil simpati masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Partai politik gencar melakukan kampanye untuk menghimpun dukungan. Seperti yang dilakukan partai politik golongan karya. Partai Golongan Karya menghimpun kekuatan dukungan melalui tokoh agama, yakni Kiai. Sebab ini maka Partai Golongan Karya dan Kiai melakuka kerja sama. Bentuk kerja sama ini adalah pemberian uang pembangunan insfrastruktur Yayasan oleh Partai Golongan Karya. Sedang timbal baliknya adalah Partai Golongan Karya meminta



dukungan penuh Kiai dalam pemilu 2019. Skema ini adalah orientasi dasar hegemoni dilakukan. Menanggapi kerja sama yang terbangun antar keduanya maka Kiai selanjutnya melakukan hegemoni kepada masyarakat agar menjaid bagian dari pendukung Partai Golongan Karya. Praktik hegemoni terbagi dalam 2 kelompok. Pertama adalah masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun hegemoni dilakukan melalui pendekatan spiritual. Wujud nyatanya, praktik hegemoni dileburkan pada saat pengajian rutin. Penundukan intelektual diarahkan sebagai bentuk kepatuhan atas dawuh Kiai agar mendapatkan keberkahan. Kelompok kedua yakni kaum terpelajar dan tenaga pendidik. Hegemoni dalam kelompok ini memanfaatkan forum diskusi atau rapat koordinasi oleh semua anggota Yayasan. Lajur hegemoni bagi kelompok terpelajar dan tenaga pendidik diarahkan secara lebih rasional. Wujud nyatanya, penundukan dilakukan dengan memperlihatkan rekam jejak yang baik oleh Partai Golongan Karya.

Penelitian ini membawa kritik yakni, kiai sebagai tokoh masyarakat yang memiliki posisi tinggi tidak selayaknya menggunakan kekuasaan untuk melakukan penundukan. Penundukan secara intelektual tidak mencerminkan kedaulatan negara dengan asas demokrasi. Hak pilih menjadi salah satu wujud nyata demokratisasi. Namun, dengan tindakan hegemoni yang dilakukan maka secara tidak sadar hak pilih telah direnggut. Saran penelitian yang bisa diberikan adalah bahwa Kiai dalam struktur sosial masyarakat dengan strata atas sudah seharusnya turut menjadi aktor yang netral. Bahwa pilihan partai politik bagi masyarakat sudah seharusnya dipilih secara netral, berdasarkan rekam jejak tanpa adanya penundukan pengetahuan masyarakat untuk memilih partai politik berdasarkan satu kepentingan. Rancangan penelitian lanjutan bisa diarahkan untuk melihat peluang kegagalan hegemoni oleh Kiai sebab kondisi masyarakat yang semakin berkembang. Kemajuan masyarakat dalam berpikir secara rasional akan dimiliki, salah satunya dalam pemutusan pilihan partai politik yang tidak lagi didasarkan atas sikap tunduk kepada Kiai. Namun, pemilihan didasarkan pada rasionalitas masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Adiyanto, W. & R. W. (2020). Kekuasaan Kiai Dalam Politik : Modal Fuad Amin Sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Bangkalan. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 8(1), 59–68.  
<http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/15147>
- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci ( 1891-1937) Di Italia. *Jurnal Yaqhzan*, 3(2), 63–81.  
<https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqhzan/article/view/5482>
- Anugrah, Y. V. & A. M. F. (2015). Hegemoni Santri Terhadap Kiai. *Journal Of Society And Media*, 7(4).  
<https://jurnal mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/31068>
- Asmidar. Dr. Efendi Hasan, M. . (2019). Praktek Money Politik Pada Pilkada Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 4(September), 9.  
<http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/12643>
- Azhar, A. (2017). *Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat* (Mawardi Siregar (ed.); 1st ed.). Atap Buku Yogyakarta.  
<http://repository.uinsu.ac.id/1254/>
- Aziz, Y. M. (2021). Hegemoni Kekuasaan Ustadz Hikmat Arif Terhadap Masyarakat Kampung Dalur Mawar Desa Bojong Pandan Kabupaten Serang: Perspektif Teori Antonio Gramsci. *Jurnal Silatene (Jurnal Sosial Humaniora)*, 01(01), 50–70.  
<https://silatene.org/index.php/s/article/view/10>
- Dr. H. Boy S. Sabarguna. (2006). *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Dr. Tjipto Subadi, M. S. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif* (E. F. Hidayati (ed.); 1st ed.). Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Efriza, N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17–38.  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1314>
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Jurnal Resolusi*, 1(1), 5–16.  
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/154>
- H. Sadi. (2016). Kiai Dan Politik : Mengintip Motif Kiai NU Dalam Pemilu 2009 Di Glenmore Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, X(1), 21.  
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/khazanah/article/view/1070>
- Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi

Sosial : Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kyai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura. *Sosial Budaya*, 16(1), 9.

<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/7037>

Haris dkk, S. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia* (I. N. & M. N. Bhakti (ed.)). Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) Jakarta,.

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Panduan-Rekrutmen-dan-Kaderisasi-Parpol-Ideal.pdf>

Harjito. (2009). Hegemoni Gramsci. *Majalah Ilmiah Lontar*, 23(4), 1.

<https://www.neliti.com/id/publications/219831/hegemoni-gramsci>

Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi. *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia*, 12((Oktober-Desember)), 1–17.

[https://www.academia.edu/4149115/Hegemoni\\_Kekuasaan\\_dan\\_Ideologi](https://www.academia.edu/4149115/Hegemoni_Kekuasaan_dan_Ideologi)

Ibad, S. & M. (2019). Partai Politik : Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa. *PUBLIK : Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2).

<https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/422>

Jannah, N. (2019). Realitas Pesantren dan Kebijakan Pendidikan Islam dalam Perspektif Hegemoni Antonio Gramsci. *Journal of Islamic Education Research*, 1(01), 1–21.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/334>

Kamuri, J. P. (2019). Hasrat Ekonomi Politik Dan Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia Jelang Pemilu 2019. *SOCIETAS DIE : Jurnal Agama Dan Masyarakat*.

<http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/article/view/108>

Kasdi, A. (2017). KARAKTERISTIK POLITIK ISLAM: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik. *Jurnal Kalam*, 9(2), 305.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/334>

Meyer, T. (2012). *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis* (3rd ed.). Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia.

<https://pustakaaceh.perpusnas.go.id/detail-opac?id=55769>

Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Cultural Capital dan Kharisma Kiai dalam Wacana Partai Politik. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2(2), 185–196.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/946>

Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). PT RajaGrafindo Persada. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>

Nambo, A. B., & Puluhuluwa, R. (2005). *MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP*

- POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik) Abdulkadir B. Nambo \*\* dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa \*\*\*. XXI(2), 262–285.*  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/177>
- Nasir, N. (2015). Kyai Dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya. *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 26–49.  
<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/826>
- Noor, F. (2016). KEGAGALAN PARTAI POLITIK MENARIK SIMPATI RAKYAT: Urgensi Sebuah Paradigma Baru Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 4(1), 369.  
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/447>
- Nurhadi, S. (2018). Peran Kiai Dalam Membangun Partisipasi Pemilih. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 174.  
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7821>
- Nurma Yuwita, Ahmad Aminuddin, G. S. (2019). Netralitas Politik Kiai Dalam Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik. *Jurnal Dakwah Risalah*, 30(2), 134.  
<http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/risalah/article/view/8047>
- Okthariza, N. (2019). *Petahana, Patronase , dan Politik Uang di Jawa* (01/2019; WPSPOL, Issue February).  
[https://www.csis.or.id/uploaded\\_file/publications/petahana\\_\\_patronase\\_\\_dan\\_politik\\_uang\\_di\\_jawa.pdf](https://www.csis.or.id/uploaded_file/publications/petahana__patronase__dan_politik_uang_di_jawa.pdf)
- Pradana, M. Y. A. (2021). Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama Dalam Hegemoni Pemilukada 2020. *LIVING ISLAM : Journal Of Islamic Discourses*, 3(2).  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/2418>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* (4th ed.). CV. Alfabeta.
- Qomaruddin. (2018). Analisis Pemikiran Antonio Gramsci Tentang Hegemoni Menurut Konsep Dunia Islam. *Ejournal.Kopertais4.or.Id*.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/2994>
- Ramlah. (2020). Kontribusi Partai Politik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. *Jurnal Vox Populi*, 3(1), 53.  
<http://103.55.216.56/index.php/voxpathuli/article/view/14078>
- Rosi, F. (2020). Gerakan Politik Kiai dan Dakwah Islam : Membaca Aktifitas Dakwah dan Politik Kiai pada Momentum Pemilu. *Jurnal Dakwah Risalah*, 07(02), 134.  
<https://ejournal.stainh.ac.id/index.php/jurnal/article/view/34>
- Sadewo, F. S. (2016). *Meneliti itu mudah* (M. Legowo (ed.); Pertama). Unesa University Press.
- Singarimbun, M. (1995). *Metode Penelitian Survei* (Sofian Effendi (ed.); 2nd ed.). PT

Pustaka LP3ES Indonesia.

Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Jurnal Translitera*, 5(4), 11–33. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/view/355>

Suryadi, K. dkk. (2021). Strategi Komunikasi Politik Digital Partai Politik Baru (Studi Kasus Pada Partai Solidaritas Indonesia). *MAKNA : Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya*, 8 (1). <http://repository.upi.edu/id/eprint/57838>

Teguh Imansyah. (2012). Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. *Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1, 387. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/91>

Wicaksono, F. (2019). Kiai Kharismatik dan Hegemoninya (Telaah Fenomena Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(3), 121–127. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/678>

Zein, F. M. (2016). Kritik konsep politik machiavelli dalam perspektif etika politik islam (Perbandingan Dengan Etika Politik Al Mawardi). *MAHKAMAH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 489–507. <https://www.journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/52>

